

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah yang krusial sepanjang sejarah Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprediksi perihal pertumbuhan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia akan mencapai 60%. Jawa Tengah menurut laporan Badan Pusat Statiska, sampai Maret 2016 penduduk miskinnya berjumlah 4.506,89 ribu jiwa dengan presentasinya 13,27 %. Salah satu hal yang menyebabkan kondisi tersebut adalah kebangkrutan usaha dan kurangnya lapangan kerja (Zuhri, 2012: 4).

Kemiskinan yang menjadi warisan dari generasi ke generasi berikutnya mengakibatkan keterpurukan suatu masyarakat bersifat kronis dan sulit diurai. Efek domino yang ditimbulkan oleh kemiskinan mengakibatkan berbagai masalah pada sisi lainnya seperti gizi buruk, rendahnya pendidikan, tindak kriminal dan kerawanan sosial. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa kemiskinan berpotensi menjadi momok yang mengkhawatirkan dan menjadi *entry point* (titik awal) atas kerawanan akidah dan berpeluang menjadi konversi keagamaan seseorang. Rasulullah telah memperingatkan dengan tegas perihal **كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا** yang artinya nyaris kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi kafir (Rofiq, 2010: vii).

Pembangunan telah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk mengurai kondisi tersebut. Berbagai program dan pendanaan telah

digelontorkan dan digalakkan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun angka-angka kemiskinan setiap tahunnya masih cukup besar dan kelompok-kelompok masyarakat miskin masih banyak (Bahri, 2014: th).

Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi disebabkan oleh faktor yang beragam. Kaum dhuafa atau masyarakat yang lemah dalam persoalan ekonomi menjadikan mereka tidak mendapat pendidikan yang layak, bahkan ada yang belum merasakan pendidikan baik formal maupun informal. Karena keterbatasan kemampuan dalam mendayagunakan sumber-sumber informasi dan teknologi industri, serta ketidakmerataannya kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Berbagai kalangan juga menengarai bahwa program pembangunan untuk mengentaskan kelompok masyarakat miskin salah program dan salah sasaran. Program yang digalakkan seringkali bersifat insidental dan konsumtif sehingga tingkat keberlangsungannya rendah. Program dan pendanaan berjalan sendiri, tanpa adanya pendampingan dan pengawasan dari pemerintah yang berarti (Kusmanto, 2008: 201).

Kebijakan pembangunan dan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dikembangkan seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga tidak menjadi solusi atas kemiskinan. Investasi yang ditanam baik lokal maupun asing tidak

bisa diandalkan untuk menyerap tenaga kerja karena penggunaan mesin canggih sehingga minim menggunakan tenaga manusia (Ahmad Faqih, 2012: 144).

Gagasan-gagasan untuk pembangunan dari masa lalu seringkali dilaksanakan dengan pendekatan *top-down* atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal tersebut telah menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat, namun bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keterlibatan masyarakat lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa. Kondisi tersebut yang mengakibatkan masyarakat semakin bergantung terhadap rangsangan dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan (Mulyadi, 2012: th).

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah harus dapat menjadi mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan peran lembaga-lembaga sosial, pihak swasta, dan masyarakat untuk berikhtiar secara kolektif dengan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di masyarakat. Pemerintah dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui salah satunya lembaga pengelola filantropi Islam yang mendukung kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kesempatan akan pentingnya peran aktif masyarakat terhadap tahapan pembangunan sudah sepatutnya ditumbuhkan.

Instrumen alternatif diperlukan dan diharapkan agar mampu menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah ekonomi. Salah satu instrumen tersebut adalah pengelolaan filantropi Islam di Indonesia secara optimal. Filantropi Islam merupakan sistem distribusi harta yang egaliter sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan rakyat. Hal tersebut dikarenakan akumulasi harta di tangan seseorang atau suatu kelompok saja sangat ditentang oleh al-Qur'an (Huda, 2015: 74). Zakat diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan jaminan sosial (Supena, 2009:2).

Kesuksesan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan tentunya tidak dapat dilepaskan dari program yang telah disusun melalui manajemen yang baik. Implementasi manajemen zakat, infaq, dan sedekah dalam suatu program pengentasan kemiskinan tentu erat kaitannya dengan manajemen secara umum. Oleh sebab itu, penyusunan program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan atau memenuhi kewajiban pada mustahik harus melalui sistem perencanaan (*planning*) yang matang. Hal tersebut berguna menekan segala kemungkinan buruk dalam setiap pelaksanaan program.

Mengingat zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting serta potensi yang besar dalam pengentasan kemiskinan, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Melalui cara tersebut zakat diyakini akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang semakin baik, ditandai dengan

peningkatan produktivitas, pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat (Asnaini, 2008: vi).

Indonesia sebagai negara *voluntarily basis*, yakni negara yang mempunyai sistem zakat dengan dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat juga telah mengatur perihal pengelolaan zakat, termasuk didalamnya yaitu amil zakat (Huda, 2015: 74). Amil zakat yakni orang yang berperan dalam pengumpulan, pendistribusian dan usaha melakukan pendayagunaan ekonomi masyarakat (Qardawi, 1987: 545). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai regulasi pengelolaan zakat di Indonesia menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan secara lembaga oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga bentukan masyarakat.

Tujuan zakat tidak hanya sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan, sehingga zakat dapat menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat sepanjang zaman (Dahar, 2012: 262). Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud jika tidak ada peran aktif muzaki dan pengelola zakat. Amil atau pengelola zakat dituntut untuk profesional dan inovatif dalam mengelola dana zakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan zakat dan mencapai tujuan tersebut adalah dengan pengelolaan zakat dengan cara produktif. Zakat produktif dapat dilaksanakan apabila

kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif menjadi jalan alternatif dalam mendayagunakan modal guna meningkatkan kemakmuran kaum dhuafa. Zakat produktif menjadi penting dilaksanakan karena dengan cara tersebut maka program lebih fokus terhadap pemberdayaan masyarakat (Nurdin, 1990:8).

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadilan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang matang sehingga tujuan dari program, yakni membuat masyarakat menjadi berdaya dapat tercapai.

Strategi pemberdayaan dengan zakat produktif dipilih karena mampu melibatkan seluruh unsur bangsa. Masyarakat yang kurang mampu menjadi subjek untuk menentukan nasibnya sendiri dan memandang inisiatif kreatif rakyat sebagai konsep utamanya. Sementara pemerintah bersama elemen-elemen masyarakat lainnya memegang peran sebagai fasilitator, regulator, pendamping dan stimulator sehingga masyarakat menjadi lebih berkembang (Mulyadi, 2012: th).

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian dan belas kasihan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan

atas usaha sendiri. Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan masyarakat miskin yang dinilai tertindas oleh sistem dalam struktur sosial (Malik, 2012: 186).

Upaya untuk pemberdayaan mustahik diharapkan tidak hanya dapat membantu mengurangi beban orang miskin saja, namun dapat menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan adanya dana zakat yang telah diproduktifkan, maka mustahik diharapkan mempunyai penghasilan tetap, serta meningkatkan dan mengembangkan usaha. Sehingga yang dahulunya masyarakat berstatus menjadi mustahik dapat berubah menjadi muzaki. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah salah satu lembaga zakat yang tidak hanya menerapkan metode pendayagunaan zakat secara konsumtif, namun telah menerapkan metode pendayagunaan zakat secara produktif.

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah berupaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Hal tersebut dilaksanakan dengan meningkatkan akses ke dalam sumber-sumber perbaikan ekonomi seperti pemberian modal dan lapangan kerja, peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan. Setiap program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa mendapatkan pendampingan yang sekiranya dibutuhkan oleh mustahik. Misal dalam program ekonomi, maka mustahik akan mendapatkan bantuan modal, ketrampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter hingga mustahik tersebut menjadi mandiri.

Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah dengan program waralaba sosial yang merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi produktif. Program tersebut digarap oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah mulai tahun 2016. Program waralaba sosial dikelola secara sistematis dan intensif, dengan melibatkan dua mitra usaha waralaba di masyarakat yakni Mendoan Adam khas Purwokerto dan Tahu Mercon. Model usaha waralaba dipilih karena keharusan memenuhi persyaratan telah jelas memiliki keuntungan. Salah satu mustahik yang sukses adalah Sulastri, yang mampu menjual 150 hingga 200 lembar tempe mendoan setiap harinya.

Realitas tersebut membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang implementasi program waralaba sosial dalam pemberdayaan mustahik dengan zakat produktif oleh Dompot Dhuafa. Sejauh yang peneliti ketahui, bahwa Lembaga Amil Zakat di Jawa Tengah yang menggunakan program usaha waralaba untuk pemberdayaan mustahiknya hanyalah Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan dirasa perlu untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana proses implementasi Program Waralaba Sosial dalam pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Jawa Tengah?
2. Bagaimana respon mustahik Program Waralaba Sosial Dompot Dhuafa Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memperoleh data tentang proses implementasi Program Waralaba Sosial dalam pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan manajemen dakwah.
- b. Memperoleh data tentang respon mustahik program waralaba sosial di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan literatur untuk menambah wacana baru, memperkaya khasanah bagi dunia akademis, serta dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya. Penelitian ini semoga dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah keilmuan utamanya di bidang penelitian Ilmu Dakwah, dan secara khusus di bidang kajian Manajemen Dakwah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran salah satu strategi yang dapat dilaksanakan dalam mendayagunakan zakat. Serta memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, utamanya tentang implementasi program dalam pemberdayaan mustahik. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberi tambahan informasi dan bahan evaluasi bagi

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat tentang pemberdayaan mustahik.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian perihal implementasi program guna pemberdayaan mustahik dengan filantropi Islam bukanlah yang pertama. Berbagai perspektif telah digunakan untuk meneliti seperti strategi pemberdayaan, pendayagunaan dan pengelolaan filantropi Islam oleh para peneliti. Untuk mendukung rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, maka berikut adalah rincian beberapa penelitian, yang akan digunakan sebagai kajian *research* sebelumnya, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Amalia dan Kasyful Mahalli dengan judul *Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan*. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1 Desember 2012. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, dengan metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah korelasi, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan metode pustaka. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah masyarakat sangat setuju dengan pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal disertai pelatihan dan ketrampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat menjadi masyarakat mandiri. Pendayagunaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan dengan memperhatikan golongan yang tepat sasaran.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh A. A. Miftah dengan judul *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indoneisa*. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam Jurnal *Innovatio*, Vol. VIII, No. 2 Juli Desember 2009. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah dana zakat dinilai kurang mampu memberikan kontribusi dalam masalah pengentasan kemiskinan. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap kegagalan tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dengan tetap melanjutkan pengelolaan zakat secara tradisional. Oleh karena keadaan tersebut, maka penting untuk dilaksanakan pembaharuan konsep zakat dalam persepsi, sistem hukum, pengelolaan dan pengaplikasian.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Eka Resti Mardioasih pada tahun 2014 dengan judul *Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang Tahun 2012*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang tahun 2012 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif. Sedang metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang meliputi perencanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif. Program pengumpulan meliputi pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), pendataan mustahik, membuat area penyaluran seperti membagi wilayah yang

akan mendapatkan zakat produktif. Sedangkan pengawasannya yaitu mengawasi para mustahik yang menerima zakat produktif supaya mustahik tersebut tidak mengalami kredit macet. Pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang juga mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya berupa perolehan dana zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan serta terdapat regulasi yang mengatur. Sedang faktor penghambatnya berupa mustahik yang mengalami kredit macet dan kesulitan dalam pengawasan.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Hidayah Rohmawati dengan judul *Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Studi Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)* pada tahun 2011. Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan pada BAZ di Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui interview, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran atas pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif, sedang pendayagunaan diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif. Faktor penghambatnya adalah tidak membayarnya

zakat oleh semua muzaki, juga tidak semua muzaki menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kabupaten Jepara.

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Masruroh dengan judul *Aplikasi Rencana Strategis dalam Pengelolaan Zakat di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Weleri Kabupaten Kendal Tahun 1430 H/ 2009 M* pada tahun 2011. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui rencana strategis dalam pengelolaan zakat di Bapelurzam PCM Weleri Kabupaten Kendal dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Bapelurzam PCM Weleri Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan manajemen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil temuan Bapelurzam merupakan salah satu lembaga yang cukup tua dengan mengelola zakat *amwal*. Bapelurzam memberikan pengertian bahwa zakat *amwal* lebih diarahkan pada zakat kepemilikan harta secara menyeluruh dengan nishab 2,5%. Mekanisme pemungutan zakat amwaal sebagaimana tercantum dalam surat At Taubah ayat 103 harus dijemput dengan peranan amil untuk memungut zakat selama bulan Ramadhan. Selain itu “jemput” juga dimaknai dengan proses edukasi yang dilaksanakan oleh Lembaga. Penyimpanan zakat diserahkan pada Kospin Jasa Weleri. Mekanisme pendistribusian dengan presentase 85 % dikelola oleh PCM Weleri dan 15% dikelola oleh Bapelurzam Atasan.

Penelitian yang telah dilaksanakan di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Persamaan dengan

penelitian yang pertama, kedua, dan keempat adalah zakat didayagunakan untuk pengentasan kemiskinan agar masyarakat berdaya. Sementara dalam hal pendekatan strategis, penelitian ini sama dengan penelitian yang kelima.

Perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas, yaitu belum ada yang meneliti pemberdayaan mustahik melalui program dengan usaha jenis waralaba. Penelitian yang pertama dan ketiga meneliti peranan zakat dengan pengelolaan yang masih bersifat global, yakni dengan zakat produktif. Penelitian ini akan menjadi hal yang baru dari penelitian sebelumnya terutama masalah konsep pendayagunaan zakat dalam bentuk waralaba guna pemberdayaan mustahik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa metodologi kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung. Penelitian ini lebih menekankan analisis terhadap suatu fenomena dan berorientasi untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Damanuri, 2010: 23). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian dengan

cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep) (Kriyantono, 2006: 196).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan program waralaba oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang diperoleh dari Manajer *Programming* dan Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan penunjang dan pelengkap dalam melaksanakan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan kinerja mustahik program waralaba, teori-teori yang berhubungan dengan waralaba dan catatan-catatan zakat, baik berupa buku atau jurnal terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan (Alsa, 2003: 47). Pelaksanaan

pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mempunyai keterikatan dengan lembaga itu, meneliti dokumen-dokumen dan/atau peninggalan yang ada, dan mengobservasi keberadaannya sekarang (Ali, 1993: 165).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014: 372). Apabila ditinjau dari bentuk pertanyaan, maka peneliti menggunakan jenis wawancara terencana - tidak terstruktur. Hal tersebut dikarenakan peneliti menyusun rencana wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Peneliti menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan peneliti bertanya kembali berdasar pada jawaban narasumber. Dengan penelitian ini, objek wawancara dari penelitian yang dilaksanakan adalah Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Manajer *Programming*, dan mustahik dari program waralaba.

b. Observasi

Observasi berarti memperhatikan dan mengikuti, dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran

perilaku yang dituju. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2010: 131). Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati keadaan secara langsung di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Objek observasi dari penelitian yang dilaksanakan adalah kantor Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah dan outlet tempat jualan mustahik program waralaba. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi nonpartisipan, di mana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak memosisikan diri ke dalam kelompok yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Dompot Dhuafa Jawa Tengah, data mustahik program waralaba, laporan kinerja mustahik program waralaba dan dokumentasi mustahik.

4. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman, menyatakan bahwa data yang telah terkumpul perlu di proses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari data primer yang terkumpul, meliputi hasil wawancara dan observasi dengan

pimpinan cabang dan manajer *programming* Dompot Dhuafa Jawa Tengah, serta mustahik dari program waralaba. Analisis selanjutnya dilaksanakan pada data sekunder untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan manajemen dakwah. Tahapan dari analisis data yang dilaksanakan adalah sebagai berikut (Yusuf, 2014: 407):

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemillihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat penentuan kerangka konseptual, tempat, perumusan permasalahan, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data juga dilaksanakan pada waktu pengumpulan data seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat pemisahan dan menulis memo.

b. *Data Display*

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun sehingga membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat *display* dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk

display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian yang terjadi masa lampau.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan utama dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian skripsi yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

Bagian Awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan atau pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstraksi, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Bagian Utama yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II : Kerangka Teori

Bab ini merupakan bagian yang mencakup tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan tinjauan umum tentang waralaba, pemberdayaan, filantropi Islam dan manajemen dakwah.

Bab III : Data Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari uraian tentang objek yang diteliti, yakni Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan perihal profil Dompot Dhuafa Jawa Tengah secara umum, seperti sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Selanjutnya pengenalan Program Waralaba Sosial di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Bab IV : Analisis

Bab ini berisi tentang analisa hasil penelitian mengenai implementasi Program Waralaba Sosial dalam pemberdayaan mustahik di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dan respon mustahik Program Waralaba Sosial di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti dan lampiran-lampiran.